

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Implementasi Prinsip Kepemimpinan Kristen

1. Teoritis Kepemimpinan Kristen

Implementasi prinsip kepemimpinan Kristen dalam pengelolaan dana desa mencerminkan tanggung jawab moral dan spiritual yang diemban oleh pemimpin desa. Dalam perspektif filsafat teologi, kepemimpinan Kristen tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi lebih mendalam dengan mengedepankan nilai-nilai seperti keadilan, kasih, pelayanan, dan integritas. Prinsip-prinsip ini menggambarkan Kristus sebagai gembala yang penuh kasih, yang memimpin bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kesejahteraan komunitas yang dipimpinnya. Joas Adiprasetya menyoroti bahwa teologi kepemimpinan Kristen selalu berkaitan dengan peran pastoral yang menekankan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan jemaat dan masyarakat, sehingga kepemimpinan tersebut menjadi sarana transformasi yang membawa dampak positif.³

Dengan demikian, seorang pemimpin tidak hanya memiliki tanggung jawab administratif, tetapi juga panggilan spiritual untuk menciptakan perubahan

³ Joas Adiprasetya, *Theologia Crucis: Menyelami Kedalaman Salib Kristus* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), 58.

yang mendatangkan kebaikan bagi komunitas. Pengelolaan yang baik tidak hanya terfokus pada distribusi dana yang tepat, tetapi juga pada cara dana



tersebut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, yang sejalan dengan kehendak Tuhan bagi komunitas tersebut. Eka Darmaputera juga menegaskan pentingnya integritas dalam kepemimpinan, di mana integritas ini tidak hanya mengenai kemampuan teknis, tetapi juga tentang kejujuran dan komitmen untuk melayani masyarakat secara tulus.⁴

Pemimpin desa yang berlandaskan iman Kristen dipanggil untuk melihat dana desa sebagai berkat yang harus dikelola dengan rasa syukur dan tanggung jawab, serta berorientasi pada pelayanan kepada sesama. Setiap keputusan mengenai dana desa harus mencerminkan prinsip keadilan sosial dan berkelanjutan. Pemimpin juga diharapkan menjadi pelayan yang setia, yang mendahulukan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, serta menghindari penyalahgunaan wewenang. Lebih jauh lagi, teologi kepemimpinan Kristen mengajak para pemimpin desa untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap proses pengelolaan dana, sehingga terwujud partisipasi yang egaliter dan kolaboratif. Implementasi prinsip-prinsip kepemimpinan Kristen dalam tata kelola dana desa tidak hanya sebatas tindakan administratif, tetapi juga sebuah panggilan etis dan spiritual untuk mencerminkan karakter Kristus dalam pengelolaan sumber daya. Ini adalah bentuk nyata dari kasih dan pelayanan yang diwujudkan dalam tindakan konkret, dengan tujuan akhir untuk mencapai

⁴ Eka Darmaputera, *Panggilan Untuk Bertindak: Kepemimpinan Kristen Dalam Perspektif Kontekstual* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001).

kesejahteraan yang menyeluruh dan berkeadilan bagi seluruh anggota masyarakat.

Pelayanan kepada masyarakat menjadi prinsip utama dalam tata kelola dana, sebab sikap tanggung jawab akan terwujud. Menurut Ken Blanchard, seorang pemimpin seharusnya mengutamakan pelayanan kepada orang lain sebagai prioritas utama. Dia menekankan bahwa melalui pelayanan kepada bawahan dan tim, seorang pemimpin dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan memberdayakan. Seorang pemimpin harus fokus pada kebutuhan, keinginan, dan perkembangan orang-orang di bawahnya, tidak hanya untuk kepentingan pribadi atau keuntungan.⁵

Menurut Mangguling, kepemimpinan tidak hanya fokus pada semangat dan keberanian, tetapi juga pada kasih sayang, kepedulian, dan pelayanan kepada orang lain. Bagi dia, seorang pemimpin efektif adalah mereka yang mampu memimpin dengan hati yang penuh kasih dan pengertian.⁶ Konsep kepemimpinan ini sejalan dengan kepemimpinan pelayan yang ditekankan oleh Blanchard. Injil Markus 8:35 juga mendukung konsep ini di mana Yesus mengajarkan bahwa pengikut-Nya harus bersedia mengorbankan diri. Ayat ini menekankan pentingnya prioritas dalam kehidupan orang percaya, bahwa mereka yang mencari kepuasan diri sendiri akan kehilangan hidup yang sejati dan

⁵ Blanchard Ken, *Serveen Leadership in Action* (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia., 2019).

⁶ Solaiman Mangguling, *Invisible Hand* (Yogyakarta: Gunung Sopia, 2015).

abadi. Tetapi orang yang siap untuk menyerahkan hidupnya demi Yesus dan Injil-Nya akan menemukan hidup yang sejati dan kekal.

2. Kepemimpinan Hamba

Kepemimpinan hamba menekankan pentingnya pemimpin untuk melayani pengikutnya terlebih dahulu sebelum memimpin. Konsep ini diperkenalkan oleh Greenleaf pada tahun 1970 dalam esainya yang berjudul *"The Servant as Leader."* Greenleaf mengusulkan bahwa seorang pemimpin yang efektif adalah seseorang yang memiliki keinginan tulus untuk melayani orang lain, mengembangkan mereka secara personal dan profesional, serta memastikan kebutuhan mereka terpenuhi.⁷

Dalam kepemimpinan hamba, pemimpin memiliki beberapa karakteristik kunci yang membedakan mereka dari model kepemimpinan tradisional. Salah satu karakteristik utama adalah kemampuan untuk mendengarkan. Seorang pemimpin hamba harus mampu mendengarkan secara aktif dan tulus terhadap kebutuhan serta kekhawatiran pengikutnya.⁸ Dengan mendengarkan, pemimpin tidak hanya mendapatkan informasi yang diperlukan, tetapi juga membangun kepercayaan dan hubungan yang kuat dengan pengikutnya. Empati adalah aspek lain yang sangat penting dalam kepemimpinan hamba. Pemimpin yang empatik dapat memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain.⁹ Hal ini

⁷ Robert K. Greenleaf, *Pemimpin Sebagai Pelayan. Pusat Kepemimpinan Hamba* (Greenleaf, 1970).

⁸ C. Spears. Arry, *Mempraktikkan Kepemimpinan Pelayan*, 2004, n.d.

⁹ Peter G. Northouse, "Kepemimpinan: Teori Dan Praktik" (2016).

memungkinkan mereka untuk memberikan dukungan yang tepat dan membantu pengikutnya dalam menghadapi tantangan.

Selain itu, kepemimpinan hamba juga menekankan pada kemampuan pemimpin untuk menyembuhkan. Pemimpin hamba berusaha untuk membantu pengikutnya menyelesaikan masalah pribadi dan profesional mereka, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan individu. Kesadaran diri adalah elemen penting lainnya. Pemimpin hamba memiliki pemahaman yang mendalam tentang diri mereka sendiri dan situasi di sekitar mereka. Mereka sadar akan kekuatan dan kelemahan mereka, serta bagaimana tindakan mereka mempengaruhi orang lain.¹⁰

Dalam hal mempengaruhi orang lain, kepemimpinan hamba lebih mengutamakan persuasi daripada otoritas. Pemimpin hamba menggunakan pendekatan yang lembut dan meyakinkan untuk mempengaruhi pengikutnya, daripada menggunakan kekuasaan atau paksaan.¹¹ Pemimpin hamba juga memiliki kemampuan untuk berpikir konseptual dan melihat gambaran besar. Mereka mampu merencanakan jangka panjang dan memiliki visi yang jelas tentang masa depan organisasi dan bagaimana mencapainya.¹²

Kemampuan untuk memprediksi hasil dari situasi yang dihadapi juga menjadi ciri khas kepemimpinan hamba. Pemimpin hamba memiliki wawasan

¹⁰ Larry C. Spears, "Mempraktikkan Kepemimpinan Pelayan Pemimpin Ke Pemimpin," no. 34 (2004).

¹¹ Northouse, "Kepemimpinan: Teori Dan Praktik," (2010). 225–250.

¹² Dirk Van Dierendonck, "Kepemimpinan Pelayan: Tinjauan Dan Sintesis," *Jurnal Manajemen* 37, no. 4 (2011).

yang memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang bijaksana berdasarkan pemahaman yang mendalam tentang situasi saat ini dan potensi dampaknya di masa depan.¹³ Kepemimpinan hamba juga menekankan pentingnya stewardship, yaitu melihat diri sendiri sebagai penatalayan dari organisasi dan orang-orang di dalamnya. Pemimpin hamba merasa bertanggung jawab untuk menjaga dan mengembangkan sumber daya yang ada.¹⁴

Komitmen terhadap pertumbuhan orang lain adalah elemen lain yang tak terpisahkan dari kepemimpinan hamba.¹⁵ Pemimpin hamba berkomitmen untuk mengembangkan potensi setiap individu dalam organisasi, baik secara personal maupun profesional.¹⁶ Terakhir, kepemimpinan hamba berfokus pada membangun komunitas. Pemimpin hamba berusaha menciptakan rasa kebersamaan dan keterhubungan di antara pengikutnya, sehingga tercipta lingkungan kerja yang harmonis dan produktif.¹⁷

3. Kepemimpinan Pelayanan

Pemimpin sebagai pelayan masyarakat bukan sebagai penguasa. Seorang pemimpin dipanggil untuk melayani dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Dalam konteks penggunaan dana desa, pemimpin Kristen diharapkan menjadi pelayan masyarakat dengan mengelola dana desa secara adil, transparan, dan bertanggung

¹³ Spears, "Mempraktikkan Kepemimpinan Pelayan Pemimpin Ke Pemimpin," (2002) 7–11.

¹⁴ Northouse, "Kepemimpinan: Teori Dan Praktik," (2010). 251.

¹⁵ Dierendonck, "Kepemimpinan Pelayan: Tinjauan Dan Sintesis," (2011). 1128.

¹⁶ Greenleaf, Pemimpin Sebagai Pelayan. Pusat Kepemimpinan Hamba, 2015. 6–8.

¹⁷ John C. Maxwell, *THING ON THESE THINGS* (Missouri: House Kansas, 2011).

jawab.¹⁸ Maxwell, seorang pakar dalam pengembangan pribadi dan kepemimpinan, sangat vokal tentang pentingnya membantu orang lain mengatasi masalah dan mencapai potensi penuh mereka. Pendekatan Maxwell sering kali berfokus pada inspirasi, pemberdayaan, dan memberikan alat yang diperlukan agar orang dapat mengatasi hambatan dan mencapai tujuan mereka.¹⁹

Blanchard mengidentifikasi beberapa elemen kunci dari kepemimpinan pelayanan sebagai berikut. Pelayanan, seorang pemimpin pelayanan memprioritaskan kebutuhan dan kesejahteraan orang lain di atas kepentingan pribadi mereka. Empati, kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain.²⁰ Pembangunan tim, fokus pada pembangunan dan pemberdayaan anggota tim, serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan mereka. Memberikan umpan balik yang konstruktif dan mendukung untuk membantu anggota tim berkembang dan meningkatkan kinerja mereka. Pemberdayaan, mendelegasikan tanggung jawab kepada anggota tim untuk memungkinkan mereka mengambil inisiatif dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Visi bersama, mengkomunikasikan nilai dan tujuan bersama kepada anggota tim untuk menciptakan kesatuan dan fokus dalam pencapaian tujuan organisasi. Memimpin dengan integritas, etika,

¹⁸ Heryanto Heryanto, "Peran Pemimpin Gereja Dalam Kepemimpinan Pelayanan Kaum Muda Masa Kini," *HARVESTER: Jurnal Teologi dan Kepemimpinan Kristen* 5, no. 1 (2020): 59–72.

¹⁹ Maxwell, *THING ON THESE THINGS*.

²⁰ Ken, *Serven Leadership in Action*.

dan kejujuran, serta menjadi teladan bagi anggota tim. Memberikan dukungan dan bantuan kepada anggota tim, baik dalam hal profesional maupun pribadi.²¹

Dalam Matius 20:28, Yesus berkata, "Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang." Ayat ini merupakan dialog antara Yesus dan murid-murid-Nya setelah ibu dari Yakobus dan Yohanes datang kepada Yesus untuk meminta kedudukan tinggi bagi kedua anaknya di dalam Kerajaan Surga. Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa siapa pun yang ingin menjadi besar di antara mereka harus menjadi pelayan bagi yang lain, bukan memerintah atas mereka.²²

4. Kepemimpinan Berbasis Nilai-Nilai Kristen

Kepemimpinan berbasis nilai-nilai Kristen didasarkan pada prinsip-prinsip seperti kasih, keadilan, integritas, dan tanggung jawab. Dalam konteks penggunaan dana desa, pemimpin Kristen diharapkan mengutamakan nilai-nilai ini dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil.²³ Adiprasetya mendorong orang untuk hidup dengan penuh empati dan kebaikan terhadap orang lain, dengan filosofi yang berfokus pada pemberian kasih sayang kepada sesama. Ini tidak hanya memotivasi orang untuk menjadi lebih baik, tetapi juga membantu mereka menemukan makna yang lebih dalam dalam hidup mereka. Darmaputra menekankan bahwa iman dan akal sehat adalah dua hal yang saling melengkapi.

²¹ Joas Adiprasetya., *Labirin Kehidupan 2* (Jakarta: Gunung Mulia, 2020).

²² Robert P. Borrong, "Kepemimpinan Dalam Gereja Sebagai Pelayanan," *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama* 2, no. 2 (2019).

²³ Agus Purwanto, "Kepemimpinan Yesus Kristus Sebagai Model Kepemimpinan Kristen," *Mathetes "Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen"* 1, no. 2 (2020): 133–140.

Iman memberikan kerangka spiritual yang penting dalam hidup, sementara akal sehat memberikan pandangan yang rasional dan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Iman yang kuat akan memandu seseorang untuk menggunakan akal sehatnya dengan bijaksana dalam menghadapi berbagai situasi.²⁴ Menurut Darmaputra, iman dan akal sehat adalah dua elemen yang tidak bisa dipisahkan dan seharusnya saling mendukung dalam menjalani kehidupan.²⁵

Maxwell menyatakan bahwa "pengetahuan itu berkuasa," yang merujuk pada gagasan bahwa pengetahuan yang diterapkan dengan benar dapat memberikan kekuatan atau keunggulan dalam berbagai situasi.²⁶ Maxwell menekankan pentingnya belajar, pertumbuhan, dan pengembangan diri sebagai kunci untuk mencapai kesuksesan dalam kepemimpinan dan kehidupan secara umum.²⁷ Galatia 5:22-23 menggaris bawahi nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin Kristen: "Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu." Berdasarkan ayat ini, kepemimpinan berbasis nilai-nilai Kristen dapat dijelaskan sebagai berikut. Karakter Kristus merupakan landasan bagi seorang pemimpin Kristen. Pemimpin Kristen harus mencerminkan sifat-sifat Kristus seperti kasih, kerendahan hati,

²⁴ Adiprasetya., *Labirin Kehidupan 2*.

²⁵ Eka Darma Putra, *Spiritualitas Siap Juang* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2020).

²⁶ Maxwell, *THING ON THESE THINGS*.

²⁷ Maxwell, *THING ON THESE THINGS*.

integritas, kesabaran, dan kebijaksanaan. Dengan karakter ini, seorang pemimpin Kristen dapat memenangkan kepercayaan dan menginspirasi orang lain.²⁸

Pemahaman Alkitab sangat penting bagi pemimpin Kristen. Mereka perlu memiliki pemahaman yang kokoh tentang Alkitab dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Alkitab menjadi otoritas tertinggi yang memandu langkah-langkah seorang pemimpin Kristen, memberikan arahan moral dan spiritual. Pengembangan diri adalah aspek penting dalam kepemimpinan Kristen. Pemimpin Kristen yang efektif harus terus berkembang, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter untuk tumbuh dalam iman.²⁹

Pelayanan dan pemberdayaan adalah prinsip utama dalam kepemimpinan Kristen. Pemimpin Kristen tidak bersifat otoriter, tetapi mengabdikan kepada orang lain dan memfasilitasi pertumbuhan rohani dan keterampilan dengan memberdayakan orang lain untuk melayani. Komunitas dan kerja tim, juga merupakan elemen penting dalam kepemimpinan Kristen. Pemimpin Kristen bekerja dalam konteks organisasi, berkolaborasi dengan anggota atau staf untuk mencapai tujuan bersama dalam kasih, persatuan, dan kolaborasi. Kolose 3:12-14 mengingatkan jemaat di Kolose bahwa mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Sebagai orang-orang yang dipilih, mereka harus menunjukkan

²⁸ Ari Suksmono Hertanto, Carolina Etnasari Anjaya, and Yonatan Alex Arifianto, "Kehambaan Kristus Sebagai Model Spiritualitas Kepemimpinan Gereja: Kajian Teologis Filipi 2:5-8," *Jurnal Teologi Gracia Deo* 3, no. 2 (2021): 131-140.

²⁹ Vernando Purba and Andrianus Nababan, "KEPEMIMPINAN HAMBABERDASARKAN MARKUS 10:42-45 DAN IMPLEMENTASINYA BAGI GURU PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN," *Jurnal Christian Humaniora* 7, no. 1 (2023): 91-111.

karakter yang sesuai dengan identitas mereka sebagai orang pilihan. Paulus menekankan pentingnya kasih sebagai ciri khas orang percaya. Kasih adalah dasar dari semua kebaikan lainnya dan harus menjadi sifat yang mendominasi hidup orang percaya. Paulus menguraikan berbagai aspek kasih, termasuk belas kasihan, kemurahan, kelemahlembutan, kerendahan hati, dan kesabaran. Semua ini adalah karakteristik yang harus dimiliki oleh orang percaya sebagai bukti dari kasih Allah yang bekerja dalam hidup mereka.

Fondasi yang kokoh untuk kepemimpinan Kristen yang efektif dan berdampak dalam kepemimpinan organisasi Kristen dan pemerintahan mencakup berbagai teori dan konsep yang berkaitan dengan struktur, fungsi, dan peran pemerintah desa dalam sistem pemerintahan. Ini melibatkan analisis bagaimana pemerintahan desa menjadi bagian dari proses desentralisasi, di mana kekuasaan dan tanggung jawab pemerintah dialihkan dari tingkat pusat ke tingkat lokal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan efisiensi pengelolaan sumber daya.³⁰ Demokrasi lokal juga mengkaji peran pemerintah desa dalam memfasilitasi partisipasi politik dan pengambilan keputusan oleh masyarakat setempat, serta upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan pemanfaatan dana desa dalam proses pengambilan keputusan.³¹

5. Kepemimpinan Berorientasi pada Kesejahteraan Bersama

³⁰ Abd Rohman, "Kepemimpinan Pelayanan Prima Di Pedesaan," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 7, no. 1 (2017): 95–105.

³¹ Arya Surendra Tazha Alviyamitha Soleha, "Pengaruh Kepemimpinan, Kesejahteraan Dan Disiplin Kerja, Terhadap Kinerja Pegawai Di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar," *Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Universitas Surakarta* 19, no. 3 (2021): 170–178.

Kepemimpinan berorientasi pada kesejahteraan bersama menekankan pentingnya program-program yang dirancang untuk kepentingan seluruh masyarakat, bukan hanya sekelompok orang atau golongan tertentu. Dalam pengelolaan dana desa, seorang pemimpin Kristen harus memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat desa, terutama mereka yang paling membutuhkan. Yeremia 29:7 memberikan sebuah pelajaran penting. Ayat ini adalah bagian dari surat yang ditulis oleh nabi Yeremia kepada para tawanan yang diasingkan ke Babel. Dalam surat tersebut, Yeremia menasihati mereka untuk hidup damai di tempat pengasingan mereka dan mendoakan kesejahteraan kota Babel, karena dalam kesejahteraan kota itu, mereka juga akan mendapat kesejahteraan. Ayat ini mengajarkan prinsip penting tentang hidup damai dan berkontribusi pada kesejahteraan tempat atau kota yang kita tinggali, meskipun berada dalam situasi yang sulit.

Maxwell, seorang ahli dalam bidang kepemimpinan dan manajemen, memiliki pandangan bahwa kepemimpinan dan manajemen yang efektif dapat membantu pemimpin dalam menghadapi tantangan.³² Maxwell menyarankan beberapa prinsip penting dalam kepemimpinan. Pertama, kepemimpinan pelayan mengutamakan pelayanan kepada orang lain daripada kepentingan pribadi. Seorang pemimpin pelayan memprioritaskan kesejahteraan anggotanya di atas keuntungan pribadi.³³

³²Maxwell, *THING ON THESE THINGS*.

³³Maxwell, *THING ON THESE THINGS*.

Kedua, pengembangan kepemimpinan adalah kunci untuk kesuksesan jangka panjang dalam era globalisasi, di mana perubahan cepat adalah norma. Kemampuan untuk mengembangkan pemimpin baru yang mampu beradaptasi dan berinovasi sangat penting. Ketiga, keterlibatan tim sangat penting untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan keunggulan kompetitif dalam organisasi yang menghadapi persaingan ketat dan perubahan yang cepat. Keempat, integritas dan etika adalah elemen kunci dalam kepemimpinan dan manajemen, terutama di tengah tekanan untuk mencapai hasil yang besar. Menjaga integritas dan etika membangun kepercayaan, reputasi yang baik, dan hubungan yang kuat dengan tim. Kelima, kepemimpinan transformasional di mana pemimpin menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk mencapai hasil yang luar biasa. Dalam dunia yang terus berubah, kemampuan untuk menginspirasi orang lain dan membawa perubahan positif adalah kunci untuk kesuksesan jangka panjang. Filipi 2:3-4 dalam Perjanjian Baru menekankan sikap saling mengasihi, kepedulian, dan pelayanan antara sesama orang Kristen. Paulus menegaskan bahwa seorang Kristen tidak boleh egois atau mementingkan diri sendiri. Mereka harus mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan orang lain dengan setia. Mengutamakan kesejahteraan dan kebahagiaan orang lain di atas kepentingan pribadi mencerminkan kasih Kristus dan kasih kepada sesama.

Dalam konteks kepemimpinan, terutama dalam pengelolaan dana desa, ayat ini mengajarkan bahwa sikap saling mengasihi, kepedulian, dan pelayanan adalah inti dari kehidupan Kristen yang sejati. Seorang pemimpin Kristen sejati

tidak mencari keuntungan atau penghargaan bagi dirinya sendiri, tetapi berfokus pada kepentingan dan kesejahteraan bersama. Kepemimpinan yang berorientasi pada kesejahteraan bersama membangun fondasi yang kokoh untuk menciptakan komunitas yang harmonis, adil, dan sejahtera. Ini adalah kepemimpinan yang mengutamakan kepentingan masyarakat luas, memprioritaskan mereka yang paling membutuhkan, dan selalu berusaha untuk mencapai kebaikan bersama dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil.³⁴

6. Kepemimpinan Berbasis Partisipatif

Kepemimpinan berbasis partisipatif menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan desa. Dalam konteks penggunaan dana desa, pemimpin tidak memegang seluruh kekuasaan, melainkan mendistribusikannya kepada masyarakat sehingga mereka turut serta dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program.³⁵ Sylvina Savitri, seorang pakar dalam bidang pelatihan dan pengembangan kepemimpinan, mempromosikan pendekatan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja individu dan tim dengan fokus pada pengembangan potensi, pemahaman diri, dan keterampilan kepemimpinan.

³⁴ Yanuar Mulyo Prasetyo, "Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Budaya Kaizen, Dan Kesejahteraan Terhadap Kepuasan Kerja," *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi* 1, no. 1 (2023): 77–86.

³⁵ Yahya Usat, "Kepemimpinan Blusukan: Model Kepemimpinan Kristen Yang Membumi," *Integritas: Jurnal Teologi* 1, no. 2 (2019): 93–100.

Pendekatan ini membantu pemimpin dan profesional untuk mencapai tujuan mereka dan mengoptimalkan kinerja secara keseluruhan.³⁶

Atifin Tahir, seorang ahli kebijakan publik, menyoroti beberapa konsep penting dalam analisis kebijakan publik. Pertama, analisis kebijakan publik melibatkan proses identifikasi masalah, formulasi kebijakan, implementasi, dan evaluasi.³⁷ Kedua, partisipasi masyarakat sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan publik untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Ketiga, efektivitas dan efisiensi adalah kriteria penting dalam menilai kebijakan publik, memastikan tujuan tercapai dengan biaya dan sumber daya minimal. Keempat, keadilan sosial harus diperhatikan agar kebijakan publik tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga adil dan merata dalam mendistribusikan manfaat kebijakan publik dan pengembangan strategi untuk mengelolanya.³⁸

Pengkhotbah 4:9 menekankan pentingnya kerja sama dan kolaborasi dalam mencapai tujuan. Ayat ini mengajarkan bahwa kerja dalam tim atau kemitraan lebih baik daripada bekerja sendirian. Dua orang yang bekerja bersama saling mendukung, melengkapi, dan menguatkan. Kolaborasi memungkinkan mereka untuk memanfaatkan berbagai bakat, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama membawa

³⁶ Sylvina Savitri, *34 Inspirasi Kepemimpinan Kontemporer* (Jakarta Selatan: Prasetya Mulya, 2016).

³⁷ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik Dan Transparansi* (Bandung: ALFABETA, 2020).

³⁸ Savitri, *34 Inspirasi Kepemimpinan Kontemporer*.

balasan yang baik, dan ketika orang bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama, hasil yang dicapai akan lebih baik. Dalam konteks kepemimpinan, ayat ini mendukung konsep kepemimpinan berbasis partisipatif, di mana dalam tata kelola penggunaan dana desa, umat atau masyarakat serta tim dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas. Pendekatan ini menciptakan sinergi dan meningkatkan kinerja keseluruhan tim atau organisasi. Partisipasi aktif masyarakat memastikan bahwa keputusan yang diambil dan program yang dilaksanakan lebih efektif, efisien, dan adil, karena mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh komunitas.³⁹

7. **Kepemimpinan Berbasis Etika dan Moral**

Kepemimpinan berbasis etika dan moral menekankan bahwa setiap tindakan dan keputusan seorang pemimpin harus sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan moral. Dalam konteks pengelolaan dana desa, pemimpin Kristen harus mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku serta mengelola dana desa dengan kejujuran tinggi. Efesus 2:10 menekankan bahwa setiap orang percaya diciptakan oleh Allah dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Allah telah menyiapkan pekerjaan-pekerjaan baik tersebut sebelumnya, dan kita diminta untuk hidup sesuai dengan rencana-Nya. Ayat ini mengajarkan pentingnya perbuatan baik sebagai bukti dari iman kita dalam Kristus Yesus.⁴⁰

³⁹ Johannis Siahaya, "Kepemimpinan Kristen Dalam Pluralitas Indonesia," *Jurnal Teruna Bhakti* 1, no. 1 (2019): 1.

⁴⁰ Hannas and Rinawaty, "KEPEMIMPINAN HAMBAN TUHAN MENURUT MATIUS 20:25-28," *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 3 (2019): 207–223.

Aristoteles memberikan pandangan yang mendalam tentang etika dan moral. Dia mengembangkan berbagai konsep dan teori tentang bagaimana manusia seharusnya hidup untuk mencapai kebahagiaan dan kebaikan.⁴¹ Beberapa konsep utama yang dikembangkan oleh Aristoteles antara lain: *'Eudaimonia'* (kebahagiaan). Tujuan tertinggi kehidupan manusia adalah mencapai kebahagiaan yang abadi. *'Eudaimonia'* bukan hanya sekadar kesenangan atau kepuasan, tetapi keadaan yang dicapai dengan hidup sesuai dengan potensi dan tujuan manusia. *'Telos'* (tujuan akhir). Setiap hal memiliki tujuan akhir tertentu yang alamiah. Bagi manusia, *"telos"* adalah *'eudaimonia'* atau kebahagiaan, yang dicapai dengan hidup sesuai dengan kebajikan. Kebajikan *"virtue"*. Aristoteles membedakan antara dua jenis kebajikan: kebajikan moral dan kebajikan intelektual. Kebajikan moral terdiri dari kebiasaan baik yang diperoleh melalui latihan dan pengalaman, sementara kebajikan intelektual melibatkan pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh melalui pembelajaran titik tengah emas *'Golden Mean'*.

Kebajikan moral terletak pada titik tengah antara dua ekstrem, yaitu kekurangan dan kelebihan. Misalnya, keberanian merupakan titik tengah antara pengecut dan pemberani berlebihan. Kebajikan moral dapat diajarkan dan dipelajari melalui pendidikan dan latihan. Melalui kebiasaan dan praktik, seseorang dapat membentuk karakter yang baik. Moralitas dan Keadilan. Tujuan

⁴¹ Aristoteles, *POLITK BASABASI* (Yogyakarta, 2020).

dari etika adalah mencapai keadilan, baik keadilan individu maupun sosial. Keadilan merupakan keselarasan antara tindakan dan kondisi yang terwujud ketika setiap orang memperoleh apa yang seharusnya dia terima. Hubungan antara Etika dan Politik. Aristoteles meyakini bahwa hidup manusia tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial dan politik. Etika tidak hanya berlaku untuk individu, tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan.

Dalam Perjanjian Baru, 1 Petrus 2:12 mengajarkan pentingnya memberikan kesaksian yang baik di hadapan orang-orang yang tidak percaya, sehingga mereka dapat melihat dan memuliakan Allah melalui perbuatan baik kita. Ayat ini menunjukkan pentingnya perilaku yang baik dan hidup sesuai dengan standar moral dan etika yang tinggi, terutama di hadapan orang yang tidak percaya. Pemimpin Kristen harus hidup dengan cara yang mencerminkan kasih, kebaikan, keadilan, dan kesetiaan Kristus. Tujuan dari perbuatan baik adalah untuk memuliakan Allah dan memberikan kesaksian yang baik tentang Dia kepada orang-orang di sekitar kita. Darma Putra menjelaskan pentingnya menjalani kehidupan dengan penuh ketaatan terhadap nilai-nilai agama dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip moral yang tinggi.⁴² Dalam konteks agama, ketaatan mengacu pada kepatuhan seseorang terhadap ajaran agamanya, sedangkan kekudusan merujuk pada keberadaan seseorang yang hidup dalam kesucian dan kebenaran. Menurut Darma Putra, hidup dengan menjunjung tinggi nilai-nilai

⁴² Eka Darma Putra, *Spiritualitas Siap Juang*.

agama, kebenaran, dan kekudusan dalam setiap aspek kehidupan adalah sangat penting.⁴³

Maxwell menekankan bahwa "banyak orang gagal bukan karena kurangnya keberuntungan atau berkat, tetapi karena kurangnya kesiapan membayar harga untuk sukses".⁴⁴ Dalam konteks kepemimpinan Kristen, ini berarti kesediaan untuk mengorbankan diri, bekerja keras, dan memperjuangkan prinsip-prinsip moral dan etika yang ditetapkan oleh agama menjadi kunci mencapai kemenangan sejati. Sebagai pemimpin Kristen, seseorang harus siap menghadapi tantangan, mengatasi hambatan, dan bersedia mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan yang lebih besar, yaitu pelayanan kepada orang lain dan kemuliaan Allah.⁴⁵

B. Defenisi Desa

1. Undang-Undang Tentang Desa

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat setempat. Desa memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundang-

⁴³ Eka Darma Putra, *Spiritualitas Siap Juang*.

⁴⁴ Maxwell, *THING ON THESE THINGS*.

⁴⁵ Diany Rita P. Saragih, "Implementasi Kepemimpinan Kristen," *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama* 2, no. 2 (2019).

undangan. Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, dengan kepala desa, atau yang disebut kepala lembang, dipilih langsung oleh warga atau masyarakat desa melalui pemilihan kepala desa.⁴⁶

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur pembangunan dan pemberdayaan desa, termasuk pengelolaan dana desa. Dalam beberapa pasal, undang-undang ini memberikan pedoman yang jelas tentang pengelolaan dana desa. Pasal 59 menyatakan bahwa desa memperoleh dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang meliputi dana desa. Dana ini dialokasikan untuk desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 60 menjelaskan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan dana desa harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, keadilan, kebersamaan, dan keterbukaan.

Pasal 61 mengatur bahwa dana desa disalurkan langsung dari kas negara ke kas desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyaluran dana desa dilakukan dengan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya, Pasal 62 menjelaskan bahwa dana desa dikelola oleh pemerintah desa dan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa.

⁴⁶ Eka Darmaputra, *Eka Darmaputra, Kepemimpinan Kristen: Teori Dan Praktik Dalam Konteks Indonesia* (Jakarta: Penerbit Toba, 2015).

Pemerintah desa diwajibkan menyusun rencana penggunaan dana desa setiap tahun berdasarkan kebutuhan dan prioritas pembangunan desa.

Peran aktif masyarakat dalam pengelolaan dana desa diatur dalam Pasal 63. Pengelolaan dana desa melibatkan masyarakat desa melalui mekanisme musyawarah desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Masyarakat desa memiliki hak untuk mengawasi penggunaan dana desa. Pengawasan penggunaan dana desa juga diatur dalam Pasal 64, yang menyebutkan bahwa dana desa diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Masyarakat desa turut berperan dalam pengawasan ini melalui mekanisme musyawarah desa.

Pertanggungjawaban penggunaan dana desa diatur dalam Pasal 65, yang menyatakan bahwa pemerintah desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa kepada masyarakat melalui musyawarah desa dan kepada pemerintah kabupaten atau kota. Pasal 66 menegaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan dana desa dapat dikenai sanksi administratif, perdata, dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal-pasal tersebut memberikan landasan hukum yang jelas terkait pengelolaan dana desa untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah, termasuk anggaran dana desa, mengacu pada transparansi, pertanggungjawaban, dan kewajiban untuk menjelaskan penggunaan dana publik kepada masyarakat. Hal ini mencakup pelaporan keuangan yang jelas dan transparan serta audit atas penggunaan dana tersebut. Akuntabilitas penting untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dalam konteks ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertanggung jawab atas audit keuangan negara dan daerah untuk memastikan akuntabilitas yang tepat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, khususnya Pasal 67, mengatur tentang akuntabilitas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.⁴⁷

Menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, akuntabilitas didefinisikan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara negara dalam pengelolaan sumber daya publik. Setiap penyelenggara negara harus bertanggung jawab secara transparan dan akuntabel atas tindakan, keputusan, dan pengelolaan sumber daya publik yang mereka lakukan. Dengan demikian, akuntabilitas memegang peran penting dalam memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakat atas penggunaan sumber daya tersebut. Ini mencakup kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat tentang penggunaan sumber daya publik serta

⁴⁷ S.Th. Pdt. Alnovia Srika Putri, *Warga Lembang Ma'kuanpare Wawancara 5 November 2024.*, 2024.

hasil yang dicapai.⁴⁸ Akuntabilitas menjadi prinsip dalam 'Good Governance' (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) yang merupakan prinsip dalam pengelolaan pemerintahan yang baik dan efektif. Dalam tata kelola penggunaan dana desa, prinsip-prinsip 'Good Governance' meliputi:

- a. Partisipasi Masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.
- b. Kepemimpinan yang Baik, Pemerintah yang efektif, efisien, dan berintegritas, yang bertanggung jawab, adil, dan melayani masyarakat dengan baik.
- c. Keadilan dan keterbukaan, Sistem hukum yang adil dan transparan, serta proses pengambilan keputusan yang terbuka, jujur, dan inklusif.
- d. Akuntabilitas, pemerintah bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, serta terbuka dan transparan dalam penggunaan sumber daya publik.
- e. Efektivitas dan Efisiensi, Pemerintah yang mampu menyediakan layanan publik yang efektif dan efisien, serta menggunakan sumber daya publik secara bijaksana.
- f. Pemberantasan korupsi, pemerintah yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu mengelola sumber daya publik secara transparan dan akuntabel.

⁴⁸ Sostenis Nggebu, "Korupsi Dalam Sorotan Etika Kristen Dan Implikasinya Bagi Pendidikan Anti Korupsi," *Didache: Journal of Christian Education* 2, no. 1 (2021): 20.

- g. Kepentingan Masyarakat, Pemerintah yang mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan dan mengambil tindakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Prinsip ini menjadi landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemberantasan kemiskinan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip "*Good Governance*", diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang inklusif. Bandingkan dengan Amsal 28:13: "Barangsiapa menutup telinganya terhadap teriakan orang miskin, ia juga akan berseru-seru tetapi tidak akan dijawab." Ayat ini mengajarkan pentingnya peduli terhadap orang miskin atau yang membutuhkan pertolongan. Orang yang tidak peduli terhadap teriakan orang miskin, pada akhirnya akan mengalami kesulitan yang serupa dan tidak akan mendapatkan pertolongan ketika mereka membutuhkannya. Ini merupakan seruan untuk memiliki empati dan kepedulian terhadap sesama manusia, terutama mereka yang kurang mampu.⁴⁹

⁴⁹ Nggebu, "Korupsi Dalam Sorotan Etika Kristen Dan Implikasinya Bagi Pendidikan Anti Korupsi."